
ANALISIS *COST AND EFFECTIVITY* PROGRAM KARTU PRAKERJA DI INDONESIA

Yasserina Rawie¹, Palupi Lindiasari Samputra²

Abstract

This article discusses the feasibility of the Program Kartu Prakerja as a social security program in dealing with the problem of unemployment in Indonesia. As a form of social security program, Suharyadi et al (2015) stated that the pre-employment card program is possible to overcome the problem of unemployment and poverty in Indonesia. However, other research conducted by Shomad (2010) explains that social security cannot overcome poverty. An example is the Direct Cash Assistance (BLT) program in the era of former president Susilo Bambang Yudhoyono, who faced a number of obstacles in realizing social welfare. This research is a recommendation research as a procedure in the analysis of the Workers Card policy to see the feasibility of the program. This research uses a quantitative approach with cost and effective analysis. Cost and effectivity analysis is done by making a comparative picture related to the cost and effectiveness of Program Kartu Prakerja. Based on the results of the analysis of cost effectiveness in this study, it was found that the most effective was alternative 2 (ratio 15: Rp. 11,207,402,000,000), namely only by providing training to the unemployed. Therefore, based on the results of the analysis in this study, Program Kartu Prakerja is feasible, but there are things that need to be reconsidered, namely the provision of incentives for the unemployed.

Keywords: *Unemployment; cost and affective analysis; Kartu Prakerja.*

PENDHAULUAN

Pengangguran merupakan salah satu masalah yang masih belum bisa terselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Meski demikian, pemerintah Indonesia sudah bisa mengurangi angka pengangguran secara signifikan, yang ditunjukkan dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018. Per Agustus 2018 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat hanya sebesar 5,34%. Sementara jumlah angkatan kerja pada Agustus 2018 sebanyak 131,01 juta orang data sebelumnya. Maka dapat dikatakan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia di tahun 2018 adalah sekitar 6.995.400 orang.

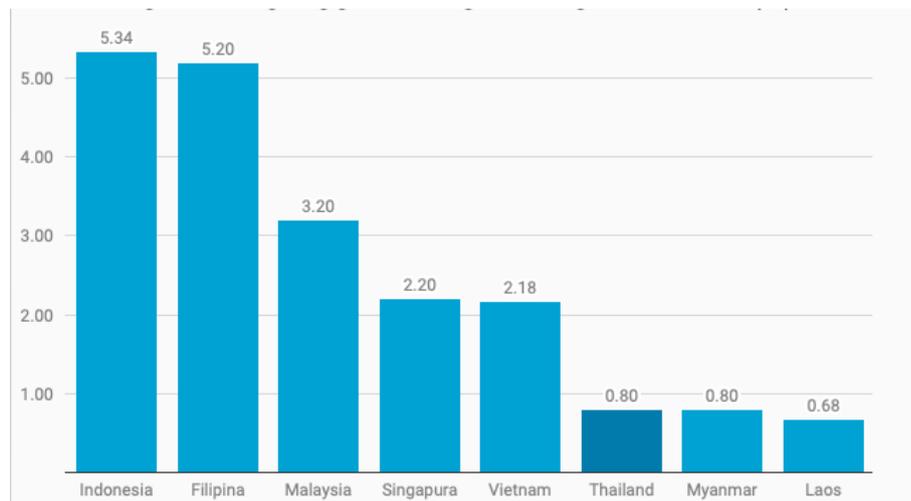
Tingkat pengangguran Indonesia merupakan yang paling besar bila dibandingkan dengan 118ltern-negara Asia Tenggara berdasarkan data *Cencus and Economic Information Center* (CEIC) tahun 2018. Dalam tabel 1, ditunjukkan bahwa tingkat pengangguran Indonesia merupakan yang paling besar, diantara Negara Filipina,

¹ Kajian Ketahanan Nasional, Sekolah Kajian Strategik dan Intelijen, Universitas Indonesia

² Kajian Ketahanan Nasional, Sekolah Kajian Strategik dan Intelijen, Universitas Indonesia

Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, Myanmar dan Laos. Secara umum, kondisi tersebut mencerminkan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang masih terbelakang, sehingga tidak dapat terserap oleh pasar tenaga kerja.

Grafik 1. Tingkat Pengangguran di Negara-negara Asean



Sumber: CEIC 2018

Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia didominasi oleh lulusan SMK, berdasarkan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019. Pengangguran terbuka lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 8,63%, Diploma (D3) 6,89%, SMA sebesar 6,78% dan perguruan tinggi sebesar 6,24%. TPT sendiri merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar. Berdasarkan data BPS itu, TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan yang tertinggi dibandingkan tingkat pendidikan lain. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhajir Effendi mengatakan bahwa penyebabnya adalah ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dengan keahlian lulusan SMK (jpn.com, 2019). Hal itulah yang kemudian menyebabkan banyak tenaga kerja lulusan SMK yang belum terserap di lapangan kerja.

Dari perspektif sosiologi, pengangguran merupakan salah satu fenomena yang berkaitan dengan institusi ekonomi dan politik dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, fenomena pengangguran dapat dijelaskan dengan teori Weber (Achwan, 2014) yang menyatakan bahwa pengangguran terjadi akibat institusi politik dan ekonomi sebagai motor penggerak kapitalisme modern tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam hal ini, kesenjangan antara pencari kerja dan ketersediaan lapangan kerja yang kemudian menyebabkan pengangguran terjadi akibat institusi politik dan ekonomi yang belum maksimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam hal ini adalah memenuhi kebutuhan terhadap lapangan pekerjaan.

Disamping itu, Dobbin (2007, dalam Achwan, 2014) menjelaskan bahwa terdapat kaitan erat antara institusi politik dan institusi ekonomi. Dalam masalah pengangguran yang dibahas dalam penelitian ini, pemerintah sebagai institusi politik melakukan perannya untuk memaksimalkan institusi ekonomi dalam menyerap tenaga kerja, dengan perangkat-perangkat hukum serta program yang dijalankan pemerintah. Masalah tingginya jumlah pengangguran di Indonesia menjadi sorotan bagi salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Presiden 2019. Berbagai strategi untuk mengatasi pengangguran dikeluarkan sebagai senjata dalam kampanye pilpres. Salah satu program yang dikeluarkan dalam kampanye Pilpres 2019 adalah program Kartu Prakerja. Program tersebut diinisiasi oleh pasangan nomor urut 01 petahana Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Kartu Pra-Kerja merupakan program andalan Joko Widodo yang ditujukan untuk mengurangi pengangguran dan mewujudkan keadilan sosial (bbc.com, 2019). Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012, insentif dan pelatihan yang diberikan melalui Program Kartu Prakerja merupakan salah satu bentuk jaminan sosial. Menurut PP No.39 Tahun 2012 jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Program Kartu Prakerja secara spesifik diperuntukkan bagi masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan.

Kartu prakerja menjadi jaminan sosial bagi para pengangguran atau angkatan kerja yang baru lulus, sebelum mendapatkan pekerjaan tetap. Jumlah pemegang Kartu Prakerja akan dibatasi kuota akan diberi pelatihan untuk mempersiapkan diri di dunia kerja dan tunjangan dalam kurun waktu tertentu. Jokowi sendiri menargetkan 500 ribu orang ikut program ini pada tahun 2019 (merdeka.com).

Program Kartu Prakerja menasar dua golongan, yaitu pekerja yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan perguruan tinggi yang belum bekerja. Kedua golongan tersebut akan mendapat pelatihan keterampilan akan dilakukan di Balai Latihan Kerja (BLK) selama dua sampai tiga bulan dan selama proses tersebut peserta akan diberi

tunjangan. Sementara untuk mantan pekerja yang kena PHK, mereka akan tetap diberi tunjangan maksimal tiga bulan setelah proses pelatihan selesai. Selanjutnya, lulusan sekolah menengah atau perguruan tinggi akan menerima tunjangan maksimal selama setahun setelah memulai pelatihan, selama mereka belum mendapat pekerjaan.

Sebagai bentuk program jaminan sosial, program Kartu prakerja dimungkinkan bisa mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Seperti yang disebutkan dalam penelitian Suharyadi dkk (2015), disebutkan bahwa jaminan sosial cukup efektif dalam mengurangi kemiskinan. Meski demikian, untuk mengurangi ketimpangan tidak dapat hanya dengan mengandalkan jaminan sosial. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektifitas jaminan sosial dalam percepatan pengurangan kemiskinan adalah: (1) Meningkatkan keakuratan penargetan – memperluas cakupan, (2) Memperbaiki integrasi sasaran program, (3) Di masa depan bantuan sosial harus memiliki target capaian yang jelas, (4) Melindungi dari risiko dalam setiap tahapan siklus kehidupan, (5) Menyediakan jaminan pendapatan minimal dan (6) Mendorong penduduk miskin dan rentan untuk keluar dari kemiskinan dan kerentanan.

Begitu pula dengan penelitian serupa yang dilakukan di India oleh Sanjeev Bhardwaj (2018) berjudul “Problems Of Unemployment In India And Its Solutions”. Dalam kajiannya, Bhardwaj menjabarkan solusi untuk mengatasi pengangguran di India antara lain adalah melakukan kontrol populasi, peningkatan kualitas pendidikan, memberikan pelatihan yang tepat, mendorong industri berbasis pertanian, mendorong industrialisasi dan melakukan pengembangan daerah pedesaan.

Penelitian lainnya yang dilakukan Shomad (2010) menjelaskan bahwa jaminan sosial tidak bisa menanggulangi kemiskinan. Penelitian Shomad (2010) menjelaskan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di era mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang menghadapi sejumlah kendala dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. Program BLT justru memicu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, yang diikuti dengan kenaikan harga-harga komoditas lainnya, sehingga menaikkan angka inflasi.

Sejak pertama kali dicetuskan oleh Joko Widodo, program kartu Prakerja mengundang banyak pertanyaan dari berbagai pihak. Seperti pernyataan Misbakhul Hasan dalam *tirto.id* mengatakan pemberian uang bagi pencari pekerja itu perlu dipikirkan lebih lanjut, terutama terkait pertimbangan sumber dana, termasuk biaya untuk pembuatan

kartu dan sosialisasinya (2018). Pertanyaan Misbakhun (2018) tersebut menunjukkan bahwa besarnya rincian biaya dan sumber dana untuk Program Kartu Prakerja harus dirumuskan secara matang terlebih dahulu. Dengan mengetahui besaran jumlah anggaran, barulah pemerintah bisa menentukan dan mencari darimana sumber dana jaminan sosial akan dianggarkan.

Selain sumber dana, lembaga riset Indef menyoroti sasaran penerima program Kartu Prakerja. Peneiti Indef, Enny Sri Hartati dalam *tirto.id* (2018), menyoroti soal siapa yang berhak menerima kartu. Menurutnya penerima tak boleh sekadar bersumber dari data jumlah pengangguran Badan Pusat Statistik (BPS). Karena data BPS tersebut hanya memuat data penganggura terbuka. Sementara masih ada pengangguran yang bekerja di bawah 35 jam (setengah menganggur) dan informal (pengangguran terselubung). Kedua kategori pengangguran yang jumlahnya hampir 29 persen tersebut berpotensi ikut mengklaim berhak menerima kartu. Ketidakpastian jumlah pengangguran kemudian menimbulkan kekhawatiran terjadinya pembengkakan anggaran.

Sebagaimana kritik yang disebutkan Hartati (2018) terkait anggaran, Program Kartu Prakerja memang merupakan jaminan sosial yang diberikan pemerintah yang biayanya diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Maka dari itu, pemerintah harus jeli dalam menentukan jumlah sasaran penerima bantuan Program Kartu Prakerja dan menentukan besaran jaminannya secara bijak, agar tidak membenani anggaran Negara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia sendiri pada tahun 2018 masih defisit. APBN tahun 2018 menurut data Kementerian Keuangan RI terdiri dari anggaran pendapatan sebesar 1.894,7 triliun dan belanja Negara sebesar 2.220,7 triliun. Sementara anggaran untuk Kementerian Ketenagakerjaan 2019 adalah Rp 4 triliun pada tahun 2018. Pada tahun 2019, anggaran ketenagakerjaan tersebut naik menjadi Rp 5,7 triliun. Dengan adanya kenaikan alokasi anggaran untuk Kementerian Ketenagakerjaan, yang notabene merupakan ranah yang sama dengan anggaran untuk program seperti Kartu Prakerja, maka terdapat peluang program ini bisa dialokasikan.

Penelitian ini merupakan penelitian rekomendasi sebagai prosedur dalam analisis kebijakan, yang menghasilkan informasi tentang kemungkinan serangkaian aksi di masa mendatang, untuk menghasilkan konsekuensi yang berharga bagi individu, kelompok atau masyarakat seluruhnya (Dunn, 2010). Untuk merekomendasikan suatu tindakan

dalam kebijakan khusus, diperlukan adanya informasi tentang konsekuensi–konsekuensi di masa depan.

Dalam membuat rekomendasi kebijakan, diperlukan analisis secara khusus yang mengarahkan kepada sejumlah pertanyaan yang saling berhubungan. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk merumuskan rekomendasi analisis kebijakan adalah analisis biaya-efektivitas atau *cost and effectivity analysis*. Analisis biaya-efektivitas merupakan suatu pendekatan untuk rekomendasi kebijakan yang memungkinkan analisis untuk membandingkan dan memberi anjuran kebijakan dengan mengkuantifikasi total biaya dan akibat (Dunn, 2000). Berbeda dengan analisis biaya dan manfaat yang mengukur semua faktor yang relevan dalam suatu satuan nilai yang umum, analisis biaya dan efektivitas menggunakan dua satuan nilai yang berbeda. Biaya diukur dalam bentuk uang, sementara efektivitas diukur dalam satuan barang, pelayanan, atau beberapa satuan nilai akibat lainnya. Analisis biaya dan efektivitas sangat tepat untuk analisis eksternalitas dan hal-hal yang tidak nyata (*intangible*), karena jenis dampak seperti ini sulit dinyatakan dalam satuan ukuran yang umum.

Terdapat sejumlah penelitian yang menggunakan teknik analisis biaya dan manfaat. Dalam penelitian Fattah (2008) yang berjudul *Pembiayaan Pendidikan: Landasan Teori dan Studi Empiris*, dijelaskan bahwa teknik *pengukuran produktivitas atau analisa efektivitas biaya* dilihat dengan mengukur biaya input (gaji guru, pengeluaran untuk pembelian buku-material- peralatan, penggunaan bangunan atau peralatan) dengan output (pencapaian objektif seperti jumlah lulusan, hasil ujian, atau pendapatan masa depan yang diharapkan).

Sedangkan dalam penelitian Saftriana (2007) yang berjudul *Analisis Manufacturing Cycle Effectiveness Dalam Meningkatkan Cost Effective Pada Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit*, *Cost effectiveness* dihitung dengan membandingkan *processing time* dengan *cycle time* yang dikenal dengan istilah *Manufacturing Cycle Effectiveness* (MCE). MCE merupakan ukuran yang menunjukkan persentase *value added activities* yang terdapat dalam suatu aktivitas yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan *value* bagi *customer*. Dengan MCE dapat diukur seberapa besar *non value added activities* dikurangi dan dihilangkan dari proses pembuatan produk. Dengan analisis MCE, kinerja perusahaan dan efektivitas ditingkatkan melalui perbaikan aktivitas yang bertujuan untuk mencapai *cost effectiveness*. Dengan analisis MCE, keputusan

dibuat sebagai langkah untuk menurunkan biaya produksi (*cost reduction*).

Berdasarkan permasalahan terkait program kartu Prakerja, penulis tertarik untuk mengetahui apakah program tersebut layak untuk dijalankan. Penelitian ini merupakan analisis kebijakan prospektif yang dilakukan untuk melihat apakah kebijakan Program Kartu Prakerja layak untuk dijalankan, guna mengatasi masalah pengangguran di Indonesia. Program Kartu Prakerja sendiri merupakan program kebijakan baru yang konsepnya masih dirancang pemerintah, sehingga hal tersebut membuat penelitian ini berbeda dari penelitian yang lain. Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan biaya dan efektivitas yang cukup jarang dilakukan dalam penelitian sosial, khususnya dalam menganalisis kebijakan yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan dan masalah ekonomi. Oleh karena itu, penelitian tentang “Analisis *Cost and Effectivity* Program Kartu Prakerja di Indonesia” ini perlu untuk dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kelayakan program kartu pra kerja dengan pendekatan *cost and effective*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan pengambilan data secara prospektif untuk mengetahui kelayakan suatu program kebijakan. Penulis membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk program kartu Prakerja dan efektivitas dari program tersebut. Efektivitas program Kartu Prakerja dilihat dari dampak positif dan dampak negatif yang akan bisa diatasi lewat program tersebut. Data yang digunakan penelitian ini adalah data primer yang didapat dari hasil wawancara dengan beberapa pihak dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, untuk mendapatkan rincian biaya untuk program Kartu Prakerja. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang didapat dari data Badan Pusat Statistik terkait jumlah pengangguran dan data dari sejumlah jurnal penelitian.

Analisis Biaya dan Efektivitas

Analisis biaya-efektivitas merupakan suatu pendekatan rekomendasi kebijakan yang dilakukan dengan mengkuantifikasi total biaya dan akibat. Biaya diukur dalam bentuk uang, sementara efektivitas diukur dalam satuan barang, pelayanan, atau beberapa satuan nilai akibat lainnya (Dunn, 2000). Analisis *cost effectiveness* merupakan suatu bentuk analisis ekonomi yang membandingkan biaya dengan hasil (efek) dari dua atau lebih tindakan.

Tabel 1. Komponen Biaya dan Efektifitas dari Program Kartu Prakerja

Biaya	Efektifitas
Biaya Primer <ul style="list-style-type: none"> • Biaya jaminan kartu prakerja • Biaya pelatihan 	Efektifitas Langsung <ul style="list-style-type: none"> • Berkurangnya tingkat pengangguran terbuka (rasio tingkat pengangguran x menghasilkan biaya berapa) • Meningkatnya rata-rata pendapatan (rasio peningkatan rata-rata pendapatan kalo jumlah pengangguran berkurang) • Meningkatnya kompetensi angkatan kerja (data2 skill, hasil uji kompetensi)
Biaya Sekunder <ul style="list-style-type: none"> • Biaya sosialisasi • Biaya pencetakan kartu 	Efektifitas Tidak Nyata <ul style="list-style-type: none"> • Berkurangnya biaya untuk mengatasi masalah sosial akibat pengangguran (Kriminal, dll)
Biaya Terselubung <ul style="list-style-type: none"> • Opportunity cost peserta program kartu prakerja 	

Sumber: Dunn, 2000.

Tabel diatas merupakan penjabaran dari komponen biaya dan efektifitas yang akan dihitung dalam analisis biaya dan efektifitas dalam kartu prakerja. Struktur elemen biaya menurut Dunn (2000) terdiri dari dua bagian utama, yaitu biaya primer (langsung) dan sekunder (tidak langsung). Biaya primer terdiri dari 3 kategori, yaitu biaya tetap sekali pakai, biaya investasi dan biaya operasional serta pemeliharaan. Sementara biaya sekunder terdiri dari biaya untuk badan-badan lain dan pihak ketiga, degradasi lingkungan, rusaknya institusi sosial dan lain-lain.

Selain itu, perlu juga memasukkan komponen biaya tidak nyata (*intangibile*) yang dikeluarkan oleh peserta program kartu prakerja. Biaya *intangibile* yang dimaksud disini adalah biaya peluang (*opportunity cost*) yang mungkin didapatkan peserta program kartu prakerja jika tidak mengikuti program tersebut. *Opportunity cost* nya bisa berupa besaran gaji yang mungkin didapatkan apabila peserta memiliki untuk langsung bekerja dibandingkan ikut pelatihan program kartu prakerja.

Sementara itu, efektifitas diukur dengan melihat kemungkinan capaian-capaian dari program kartu prakerja. Sebagaimana kategori biaya, efektifitas juga memiliki dua bagian yaitu efektifitas langsung dan tidak langsung/tidak nyata (*intangibile*). Efektifitas langsung merupakan capaian yang hasilnya bisa dilihat atau dirasakan secara langsung,

yang komponennya terdiri dari: (1) berkurangnya tingkat pengangguran terbuka, (2) meningkatnya rata-rata pendapatan, dan (3) meningkatnya kompetensi angkatan kerja (data2 skill, hasil uji kompetensi. Sementara itu efektivitas tidak langsung merupakan capaian selanjutnya yang bisa dihasilkan apabila program kartu prakerja telah dijalankan atau bisa dikatakan sebagai capaian hasilnya tidak bisa dilihat secara langsung. Komponen efektivitas tidak langsung/tidak nyata (*intangibile*) dalam penelitian ini adalah berkurangnya biaya untuk mengatasi masalah sosial akibat pengangguran.

Perhitungan mengenai biaya dan efektifitas tentu saja tidak bisa dilakukan secara tepat saat program belum dijalankan. Yang dapat dilakukan adalah pendekatan estimasi ataupun proyeksi kemungkinan di masa depan. Dalam kasus ini akan dipakai pendekatan estimasi hasil berdasarkan asumsi historis (pengalaman pelaksanaan program di masa lalu).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Program Kartu Prakerja

Kartu Prakerja adalah kartu yang diberikan kepada pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi yakni *skilling*, *up-skilling* dan *re-skilling* (*triple skilling*) serta sertifikasi kompetensi kerja. Tujuan dari program ini adalah memberikan akses kepada para penganggur, pekerja dan pekerja yang ter-PHK untuk mendapatkan peningkatan kompetensi melalui pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi kerja. Berikut pengertian dari masing-masing layanan vokasi dalam program kartu prakerja.

1. *Skilling* adalah pelatihan vokasi yang diberikan kepada penganggur atau pencari kerja dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi (*skill*) sesuai dengan kebutuhan dunia kerja sebagai bekal dalam mencari pekerjaan.
2. *Up-skilling* adalah pelatihan vokasi yang diberikan kepada pekerja dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi (*skill*) sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang sedang dijalani dalam rangka pengembangan karir.
3. *Re-skilling* adalah pelatihan vokasi yang diberikan kepada pekerja yang berpotensi ter-PHK atau telah ter-PHK dengan tujuan untuk memberikan keterampilan yang berbeda/baru guna wirausaha atau alih profesi ke pekerjaan yang baru. Re-skilling juga dapat diberikan kepada pekerja yang akan memasuki usia pensiun agar dapat berwirausaha.

4. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau standar internasional.

Benefit yang Diperoleh Pemegang Kartu Prakerja

Pemegang kartu prakerja akan memperoleh benefit berupa dapat mengikuti program pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi kerja senilai maksimal Rp. 14 juta di Lembaga pelatihan dan lembaga sertifikasi yang terakreditasi dan ditunjuk untuk menjalankan program Kartu Prakerja. Pemegang kartu prakerja dapat mengikuti program pelatihan vokasi yang biayanya melebihi Rp. 14 juta dengan ketentuan kelebihan pembayarannya ditanggung oleh pemegang kartu.

Program pelatihan yang dapat diakses oleh pemegang kartu adalah program *skilling*, *up-skilling* atau *re-skilling* disesuaikan dengan status kebecerjaan pemegang kartu.

1. Program *Skilling*

Program ini diperuntukkan untuk pemegang kartu prakerja dengan status **pengangguran** *fresh graduate*. Benefit yang diperoleh adalah:

- Training + sertifikasi selama 2 bulan senilai maksimal Rp.14 juta
- Insentif Pasca Training sebesar Rp.500 ribu per bulan selama maksimum 3 bulan setelah pelatihan

2. Program *Up-skilling*

Program ini diperuntukkan untuk pemegang kartu prakerja dengan status **pekerja**. Benefit yang diperoleh adalah:

- Training + sertifikasi selama 2 bulan senilai maksimal Rp.14 juta
- Insentif Pengganti Upah sebesar Rp.1,5 juta per bulan selama mengikuti pelatihan (2 bulan).

3. Program *Re-skilling*

Program ini diperuntukkan untuk pemegang kartu prakerja dengan status **pekerja ter-PHK** atau **berpotensi ter-PHK**. Benefit yang diperoleh adalah:

- Training + sertifikasi selama 2 bulan senilai maksimal Rp.14 juta
- Insentif pengganti upah sebesar Rp1,5 juta per bulan diberikan selama mengikuti training (2 bulan) dan maksimal 3 bulan pasca training.

Rincian diatas merupakan gambaran biaya program Kartu Prakerja yang dibuat oleh tim dari Kementerian Ketenagakerjaan RI. Seluruh besarannya diperoleh melalui perhitungan biaya program sejenis yang dijalankan oleh Kemnaker.

Jumlah Penerima Kartu Prakerja

Rencana penerbitan dan pembagian kartu prakerja ke masyarakat di tahun 2020 adalah sebanyak **510 ribu lembar** setiap tahun dengan rincian:

1. Program **Skilling: 10 ribu lembar**, dengan pertimbangan:
 - 1,5 juta lulusan SMA+SMK+MA memasuki dunia kerja setiap tahun
 - Jumlah angkatan kerja baru: 2,95 juta orang/tahun
 - Program skilling untuk lulusan baru diproyeksikan menggunakan skema APBN yang sudah berjalan hingga saat ini.
2. Program **Up-skilling: 400 ribu lembar**, dengan pertimbangan:
 - Untuk melatih pekerja di 6 sektor prioritas penggerak ekonomi (manufaktur, agribisnis, pariwisata, kesehatan, ekonomi digital, pekerja migran, total kebutuhan : 1.028.631 orang.
3. Program **Re-skilling: 100 ribu lembar** dengan pertimbangan:
 - Jumlah pekerja ter-PHK: rata-rata 350 ribu/tahun.

Gambaran Prosedur untuk Mendapatkan Bantuan Program Kartu Prakerja

Program Kartu prakerja memberikan akses kepada para penganggur, pekerja dan pekerja yang ter-PHK untuk mendapatkan peningkatan kompetensi melalui pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi kerja. Syarat untuk menjadi penerima kartu Pra Kerja adalah WNI, pencari kerja atau pekerja atau calon wirausaha atau start-up, berusia minimal 15 tahun

Pemegang kartu Pra Kerja akan mendapatkan pelatihan dan sertifikasi selama 2 bulan. Poin kelima, bagi pencari kerja, akan diberikan insentif sampai mendapat kerja atau maksimal selama 12 bulan, setelah lulus pelatihan dan sertifikasi. Keenam, bagi yang terkena PHK, akan diberikan insentif upah selama pelatihan/sertifikasi dan maksimal tiga bulan setelah lulus pelatihan/sertifikasi. Nantinya, penempatan kerja bagi lulusan pelatihan dan sertifikasi program Kartu Prakerja menjadi tanggung jawab bersama lembaga mitra, lembaga pelatihan dan lembaga sertifikasi yang menjalankan program Kartu Prakerja.

Analisis Pengukuran Biaya (Cost)

Dalam analisis *cost effectiveness* ini, penulis akan menjabarkan beberapa alternatif realisasi dari program Kartu Prakerja. Alternatif pertama adalah apabila program ini hanya memberikan biaya jaminan sosial untuk para pengangguran, alternatif kedua adalah apabila program ini dijalankan dengan memberikan pelatihan untuk para pengangguran dan alternative ketiga adalah apabila program ini dijalankan dengan memberikan biaya jaminan sosial dan pelatihan untuk para pengangguran. Ketiga alternatif tersebut dilihat untuk membandingkan metode mana yang paling efektif untuk mengatasi masalah pengangguran di Indonesia.

Terkait biaya pelatihan, salah satu penyelenggara program Kartu Prakerja berdasarkan hasil wawancara mengatakan bahwa pihaknya mengalokasikan dana sebesar Rp14.000.000 untuk setiap orangnya, untuk masa pelatihan selama 2 bulan dan sertifikasi. Biaya tersebut sudah termasuk dengan biaya pelatih, peralatan serta komponen biaya pelatihan tenaga kerja lainnya.

Sementara itu, untuk biaya sosialisasi dan publikasi untuk program kartu Prakerja menurut pihak Kemnaker adalah Rp395 Milyar. Biaya tersebut sudah termasuk biaya untuk regulasi, juknis, koordinasi, publikasi, sistem informasi, penyiapan pengantar kerja, unit layanan kartu pra-kerja, lembaga pengelola pendanaan, dan *fraud management*.

Tabel 2. Rincian Cost untuk Program Kartu Prakerja di tahun 2019

Biaya	Alternatif 1	Alternatif 2	Alternatif 3
Biaya jaminan (insentif) Kartu Prakerja (selama 3 bulan pasca pelatihan)	Program skilling Rp. 500 rb x 3 bln x 10 rb orang = Rp. 15 M	Tidak ada pemberian insentif	Program skilling Rp. 500 rb x 3 bln x 10 rb orang = Rp. 15 M
	Program Up-skilling Rp. 1,5 jt x 2 bln x 400 rb orang = Rp. 1,2 T		Program Up-skilling Rp. 1,5 jt x 2 bln x 400 rb orang = Rp. 1,2 T
	Program Re-skilling Rp. 1,5 jt x 5 bln x 100 rb orang = Rp. 750 M		Program Re-skilling Rp. 1,5 jt x 5 bln x 100 rb orang = Rp. 750 M
			TOTAL: 1,965 T

	TOTAL: 1,965 T		
Biaya Pelatihan + Sertifikasi	Tidak ada pelatihan	Program skilling Rp. 14 jt x 10 rb orang = Rp. 140 M Program Up-skilling Rp. 14 jt x 400 rb orang = Rp. 5,6 T = Rp. 5,6 T Program Re-skilling Rp. 14 jt x 100 rb orang = Rp. 1,4 T	Program skilling Rp. 14 jt x 10 rb orang = Rp. 140 M Program Up-skilling Rp. 14 jt x 400 rb orang = Rp. 5,6 T = Rp. 5,6 T Program Re-skilling Rp. 14 jt x 100 rb orang = Rp. 1,4 T TOTAL: 7,140 T
Biaya Sosialisasi dan Publikasi (Regulasi, juknis, koordinasi, publikasi, sisfo, penyiapan pengantar kerja, unit layanan kartu pra-kerja, lembaga pengelola pendanaan, dan <i>fraud management</i>)	Rp395 Milyar	Rp395 Milyar	Rp395 Milyar
Biaya Pencetakan kartu	510ribu x 5ribu = 2,550 M	510ribu x 5ribu = 2,550 M	510ribu x 5ribu = 2,550 M

Opportunity cost penerima pelatihan	-	500ribu x 3bulan x UMP Rp2.446.548 = 3.669.852.000.000 (3,6 T)	500ribu x 3bulan x UMP Rp2.446.548 = 3.669.852.000.000 (3,6 T)
Total (sementara)	Rp2.362.550.000.000	Rp11.207.402.000.000	Rp13.172.402.000.000

Sumber: Data diolah dari Kementerian Ketenagakerjaan RI (2019)

Tabel diatas menunjukkan jumlah biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk masing-masing alternatif dalam program kartu prakerja, yang besarnya didapatkan dari data Kementerian Ketenagakerjaan terkait proyeksi besaran pengeluaran untuk Program Kartu Prakerja (2019). Berdasarkan hasil penjumlahan masing-masing indikator, didapatkan bahwa alternatif 1 memerlukan biaya Rp2.362.550.000.000, yang terdiri dari biaya jaminan (insentif) Kartu Prakerja (selama 3 bulan pasca pelatihan) sebesar 1,965 T, biaya sosialisasi dan publikasi Rp395 Milyar dan biaya pencetakan kartu Rp2,550 M. Kelebihan dari alternatif ini adalah pemerintah tidak perlu mencari dan menyediakan sumber daya manusia serta biaya tambahan untuk mengadakan pelatihan kerja. Selain itu, dari segi besaran biaya, alternatif 1 memiliki biaya yang paling rendah, sehingga tidak terlalu membebani anggaran Negara. Namun kekurangannya, para penerima insentif hanya mendapatkan bantuan dana saja tanpa adanya tambahan keterampilan khusus sebagai bekal di dunia kerja nanti.

Program Kartu Prakerja dengan alternatif 2 memerlukan biaya Rp11.207.402.000.000, dengan rincian biaya pelatihan dan sertifikasi 7,140 T, biaya sosialisasi dan publikasi Rp395 Milyar, biaya pencetakan kartu Rp2,550 M dan *opportunity cost* penerima pelatihan Rp3.669.852.000.000,-. Kelebihan dari alternatif 2 adalah program Kartu Prakerja hanya benar-benar memberikan pelatihan kerja, yang sangat berguna sebagai bekal para pencari kerja untuk bisa masuk dalam dunia kerja. Alternatif ini tidak memberikan insentif berupa dana, yang sifatnya hanya dapat memenuhi kebutuhan hidup saat ini, bukan untuk masa depan. Meski demikian, dari besaran biaya, alternatif 2 memerlukan biaya yang cukup besar, yang tentunya sangat membebani anggaran Negara. Terlebih lagi, anggaran Negara untuk dialokasikan untuk anggaran ketenagakerjaan di tahun 2019 adalah sebesar Rp 5,7 triliun. Maka dari itu, alternatif ini memerlukan biaya yang cukup besar.

Sementara itu alternatif 3 memerlukan biaya Rp13.172.402.000.000, dengan rincian biaya jaminan (insentif) Kartu Prakerja (selama 3 bulan pasca pelatihan) sebesar 1,965 T, biaya pelatihan dan sertifikasi 7,140 T, biaya sosialisasi dan publikasi Rp395 Miliar, biaya pencetakan kartu Rp2,550 M dan *opportunity cost* penerima pelatihan Rp3.669.852.000.000,-. Maka dapat disimpulkan bahwa alternatif 3 membutuhkan biaya yang paling besar untuk menjalankan program kartu prakerja. Disamping biaya yang besar, pemerintah juga harus menyediakan SDM sebagai tenaga pengajar serta balai-balai pelatihan bagi para pencari kerja. Dengan demikian, alternatif ke-3 memerlukan biaya yang paling besar dibanding alternatif lainnya.

Berdasarkan penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif, dapat disimpulkan bahwa alternatif program kartu prakerja yang memerlukan biaya yang paling kecil adalah alternatif 1, dan alternatif yang memerlukan biaya yang paling besar adalah alternatif 3. Analisis dengan pendekatan *cost and effectivity* dilakukan untuk melihat perbandingan alternatif yang paling memberikan efektivitas paling baik namun dengan biaya yang paling rendah. Berdasarkan analisis dari ketiga alternatif, dapat disimpulkan bahwa alternatif dengan biaya yang paling rendah adalah alternatif ke-1. Sementara alternatif dengan biaya yang paling tinggi adalah alternatif ke-3.

Analisis Pengukuran Efektivitas

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan (Mahmudi, 2005). Semakin besar kontribusi atau sumbangan output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. David Krech, Richard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey dalam Danim (2012) menyebutkan bahwa terdapat 4 indikator efektivitas, yaitu (1) jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, (2) tingkat kepuasan yang diperoleh, (3) produk kreatif dan (4) intensitas yang akan dicapai. Sedangkan Makmur (2011) menjelaskan bahwa terdapat 8 indikator dari efektivitas, yakni (1) ketepatan waktu, (2) ketepatan perhitungan biaya, (3) ketepatan dalam pengukuran, (4) ketepatan dalam menentukan pilihan, (5) ketepatan berpikir, (6) ketepatan dalam melakukan perintah, (7) ketepatan dalam menentukan tujuan, dan (8) ketepatan sasaran. Sementara itu, M.Steers dalam Tangkilisan (2005) menjabarkan 3 indikator dari efektivitas, yaitu (1) pencapaian tujuan, (2) integrasi dan (3) adaptasi.

Berdasarkan berbagai indikator yang dijabarkan oleh beberapa sumber diatas, penulis mengambil 5 indikator yang digunakan untuk mengukur efektifitas program kartu

prakerja, yaitu (1) pencapaian tujuan, (2) intensitas yang akan dicapai, (3) ketepatan sasaran (4) ketepatan dalam pengukuran (5) ketepatan waktu. Kelima indikator tersebut dipilih untuk menyesuaikan dengan program Kartu Prakerja yang akan diukur efektivitasnya.

Tingkat efektivitas dari masing-masing komponen akan diukur dengan menggunakan rasio 1-5 yang memiliki nilai Sangat tidak berpengaruh (1), Tidak berpengaruh (2), Cukup (3), Baik (4) dan Sangat baik (5). Penentuan nilai dilihat dari apakah masing-masing komponen dapat memenuhi kelima indikator efektivitas yang telah dirumuskan sebelumnya. Atau dengan kata lain, nilai efektivitas didapat dari berapa indikator yang dipenuhi oleh suatu komponen.

Tabel 3. Rincian Effectiveness untuk Realisasi Program Kartu Prakerja di tahun 2019

Output	Alternatif 1	Alternatif 2	Alternatif 3
Mengurangi tingkat pengangguran	2 (memenuhi indikator 5, 3)	4 (memenuhi indikator 1, 2, 3, 4)	3 (memenuhi indikator 1, 2, 3,)
Meningkatnya rata-rata pendapatan	1 (memenuhi indikator 3)	3 (memenuhi indikator 1, 3, 4)	4 (memenuhi indikator 1, 2, 3, 4)
Meningkatnya kompetensi angkatan kerja	0 (tidak memenuhi indikator apapun)	4 (memenuhi indikator 1, 2, 3 5)	4 (memenuhi indikator 1, 2, 3,5)
Berkurangnya biaya untuk mengatasi masalah sosial	2 (memenuhi indikator 1, 2)	4 (memenuhi indikator 1, 2, 3, 4)	4 (memenuhi indikator 1, 2,3, 4)
Jumlah	5	15	15

Hasil pengukuran diatas menjelaskan perbandingan efektivitas setiap output untuk masing-masing alternatif yang diajukan dalam penelitian ini. Alternatif 1 (program kartu prakerja dengan hanya memberikan insentif) mendapatkan skor efektivitas sebanyak 5 poin, yang berasal dari indikator mengurangi tingkat pengangguran (2 poin), meningkatnya rata-rata pendapatan (1 poin), dan berkurangnya biaya untuk mengatasi masalah sosial (2 poin). Hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas dari alternatif 1 masih dikategorikan rendah, karena pemberian insentif saja tidak akan memberi pengaruh signifikan terhadap upaya menurunkan tingkat pengangguran.

Untuk alternatif 2 (program kartu prakerja dengan hanya memberikan pelatihan) mendapatkan skor efektivitas sebanyak 15 poin. Terdiri dari indikator mengurangi tingkat pengangguran (4 poin), meningkatnya rata-rata pendapatan (3 poin), meningkatnya kompetensi angkatan kerja (4 poin) dan berkurangnya biaya untuk mengatasi masalah sosial (4 poin). Skor efektivitas ini bisa dikatakan cukup tinggi dan cukup tepat sasaran untuk mengatasi masalah pengangguran. Hal itu dikarenakan alternatif ini dilakukan dengan memberikan pelatihan kerja bagi para pegawai atau pencari kerja, sehingga menjadi bekal bagi mereka untuk meningkatkan kemampuannya di dunia kerja.

Sementara, alternatif 3 (program kartu prakerja dengan memberikan insentif dan pelatihan) mendapatkan skor efektivitas sebanyak 15 poin. Terdiri dari indikator mengurangi tingkat pengangguran (3 poin), meningkatnya rata-rata pendapatan (4 poin), meningkatnya kompetensi angkatan kerja (4 poin) dan berkurangnya biaya untuk mengatasi masalah sosial (3 poin). Sama seperti alternatif 2, tingkat efektivitas dari alternatif 3 juga bisa dikatakan cukup tinggi atau cukup tepat sasaran. Perbedaannya, alternatif 3 juga memberikan bantuan berupa insentif dana untuk pengangguran. Meski demikian, pemberian insentif tersebut tidak terlalu berpengaruh signifikan untuk mengurangi jumlah pengangguran, justru hanya membuat mereka malas bekerja karena kebutuhan hidupnya sudah dibantu oleh pemerintah.

Maka berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas program kartu prakerja dengan alternatif 2 dan alternatif 3 memiliki skor efektivitas yang paling tinggi, yaitu 15 poin. Sementara efektivitas program kartu prakerja dengan alternatif 1 memiliki skor efektivitas yang paling rendah. Oleh karena itu, untuk itu perlu juga membandingkannya dengan komponen biaya, untuk mengetahui alternatif mana yang paling layak untuk dijalankan.

Analisis Kelayakan Program Kartu Prakerja Berdasarkan Nilai Rasio *Cost and Effectivity*

Tabel 4. Rasio Cost Effectiveness Program Kartu Prakerja

	Alternatif 1	Alternatif 2	Alternatif 3
Rasio	5 : Rp2.362.550.000.000	15 : Rp11.207.402.000.000	15 : Rp13.172.402.000.000
Peringkat	3	1	2

Hasil pengukuran tersebut menjelaskan rasio atau perbandingan antara biaya dan efektivitas dari masing-masing alternatif program kartu prakerja. Alternatif yang memiliki *cost* atau biaya yang paling rendah dan tingkat efektivitas paling tinggi, akan menjadi alternatif yang paling direkomendasikan dari penelitian ini.

Hasil perbandingan *cost effectiveness* diatas menunjukkan bahwa yang paling efektif adalah alternatif 2, yaitu hanya dengan memberikan pelatihan kepada para pengangguran. Sementara, alternatif 1 menjadi yang paling tidak efektif karena pemberian jaminan sosial tanpa adanya pelatihan tidak serta merta meningkatkan jumlah pengangguran dan meningkatkan rata-rata pendapatan nasional.

Alternatif 1 memiliki nilai rasio 5 : Rp2.362.550.000.000, yang artinya dengan nilai efektivitas sebanyak 5 poin dan biaya sebesar Rp2.362.550.000.000. Kelebihan dari alternatif ini adalah pemerintah tidak perlu mencari dan menyediakan sumber daya manusia serta biaya tambahan untuk mengadakan pelatihan kerja. Selain itu, dari segi besaran biaya, alternatif 1 memiliki biaya yang paling rendah, sehingga tidak terlalu membebani anggaran Negara. Namun kekurangannya, para penerima insentif hanya mendapatkan bantuan dana saja tanpa adanya tambahan keterampilan khusus sebagai bekal di dunia kerja nanti, sehingga dari sisi efektivitasnya kurang tepat sasaran.

Alternatif 2 memiliki nilai rasio 15 : Rp11.207.402.000.000, yang artinya dengan nilai efektivitas sebanyak 15 poin dan biaya sebesar Rp11.207.402.000.000. Kelebihan dari alternatif 2 adalah program Kartu Prakerja hanya benar-benar memberikan pelatihan kerja, yang sangat berguna sebagai bekal para pencari kerja untuk bisa masuk dalam dunia kerja. Alternatif ini tidak memberikan insentif berupa dana, yang sifatnya hanya dapat memenuhi kebutuhan hidup saat ini, bukan untuk masa depan. Meski demikian, dari besaran biaya, alternatif 2 memerlukan biaya yang cukup besar, yang tentunya sangat membebani anggaran Negara. Terlebih lagi, anggaran Negara untuk dialokasikan untuk anggaran ketenagakerjaan di tahun 2019 adalah sebesar Rp 5,7 triliun. Maka dari itu, alternatif ini sebenarnya tepat sasaran, namun memerlukan biaya yang cukup besar.

Sedangkan, alternatif 3 memiliki nilai rasio 15 : Rp13.172.402.000.000, yang artinya dengan nilai efektivitas sebanyak 13 poin dan biaya sebesar Rp13.172.402.000.000. Maka dapat disimpulkan bahwa alternatif 3 membutuhkan biaya yang paling besar untuk menjalankan program kartu prakerja. Meski demikian,

keuntungan atau kelebihan yang bisa dicapai sama saja dengan alternatif 2 yang biayanya tidak sebesar alternatif ke-3 ini.

Berdasarkan penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif, dapat disimpulkan bahwa alternatif program kartu prakerja yang memerlukan biaya yang paling kecil adalah alternatif 1, dan alternatif yang memerlukan biaya yang paling besar adalah alternatif 3. Sementara itu, alternatif yang memiliki efektivitas paling tinggi atau paling tepat sasaran adalah alternatif 2, sedangkan alternatif yang memiliki efektivitas paling rendah atau paling tidak tepat sasaran adalah alternatif 1.

Analisis dengan pendekatan *cost and effectivity* dilakukan untuk melihat perbandingan alternatif yang paling memberikan efektivitas paling baik namun dengan biaya yang paling rendah. Berdasarkan analisis dari ketiga alternatif, alternatif ke-3 memberikan efektivitas yang setara dengan alternatif 2, namun dengan biaya yang jauh lebih besar. Maka dapat dikatakan bahwa alternatif ini tidak efektif dalam mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan penerapan tenaga kerja di Indonesia. Selain tidak efektif, alternatif ini juga memberatkan secara finansial bagi Negara, karena anggarannya sebesar dua kali lipat dari alokasi pemerintah untuk biaya ketenagakerjaan.

Sementara itu, alternatif 1 memberikan efektivitas yang kurang namun dengan biaya yang rendah. Alternatif ini juga dinilai tidak efektif dalam mencapai target atau sasaran dalam mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan penerapan tenaga kerja di Indonesia. Program dalam alternatif 1 yang hanya memberikan insentif berupa uang kepada pengangguran, dinilai hanya membantu kondisi finansial secara temporer dan tidak memberikan akses dan bekal kepada mereka untuk berkerja dan memenuhi kebutuhan hidup mereka di masa mendatang. Hal ini sebagaimana penelitian dari Suharyadi dkk (2015), bahwa untuk mengurangi ketimpangan tidak dapat hanya dengan mengandalkan bantuan sosial. Hal yang lebih efektif untuk mengurangi ketimpangan adalah memberikan akses pekerjaan dan bekal keterampilan yang mendorong seseorang untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Dari 3 tiga alternatif yang terdapat dalam penelitian ini, alternatif yang memiliki efektivitas paling adalah alternatif ke-2. Dengan biaya yang lebih minim dari alternatif 3, alternatif 2 memberikan efektivitas yang lebih tepat sasaran, yakni dengan cara memberi pelatihan kepada calon tenaga kerja. Dalam Mulyadi (2016) dijelaskan bahwa pelatihan merupakan bentuk pemberdayaan sosial yang efektif untuk mengatasi masalah

pengangguran, karena masyarakat dapat menentukan nasibnya sendiri dengan keterampilan yang diberikan melalui pemberdayaan sosial. Dalam hal ini, pemerintah hanya menjadi fasilitator sedangkan pelakunya tetap masyarakat dengan status tersebut. Maka dari itu, alternatif yang diajukan atau direkomendasikan dalam penelitian ini, sebagai alternatif yang paling layak untuk dijalankan adalah alternatif 2.

PENUTUP

KESIMPULAN

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 27 Ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Meski demikian, hingga saat ini Indonesia masih belum bisa lepas dari masalah pengangguran. Pengangguran menjadi salah satu masalah serius yang menjadi perhatian pemerintah. Berbagai strategi untuk mengatasi pengangguran dikeluarkan, salah satunya adalah program Kartu Prakerja. Sebagai bentuk program bantuan sosial, program Kartu prakerja dimungkinkan bisa mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Dalam pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan analisis *cost effectiveness* terhadap Program Kartu Prakerja. Pengukuran *cost effectiveness* dilakukan untuk mengetahui alternatif mana yang paling memberikan manfaat besar dengan biaya yang paling kecil atau minimal. Berdasarkan hasil analisis *cost effectiveness* diatas, didapatkan hasil bahwa yang paling efektif adalah alternatif 2, yaitu hanya dengan memberikan pelatihan kepada para pengangguran. Sementara, alternatif 1 menjadi yang paling tidak efektif karena pemberian jaminan sosial tanpa adanya pelatihan tidak serta merta meningkatkan jumlah pengangguran dan meningkatkan rata-rata pendapatan nasional. Selain itu, pemberian jaminan sosial atau insentif juga akan membebani anggaran Negara. Berdasarkan hasil pembahasan, program kartu prakerja layak untuk dijalankan, karena memiliki manfaat untuk para pencari kerja dan juga angkatan kerja yang sudah bekerja. Program ini mencakup pemberian insentif dan pelatihan vokasi yang ditujukan untuk para lulusan SMA/SMK/PT yang baru ingin mencari kerja, pekerja yang terkena PHK dan karyawan yang sudah bekerja.

Dalam Mulyadi (2016) dijelaskan bahwa pelatihan merupakan bentuk pemberdayaan sosial yang efektif untuk mengatasi masalah pengangguran, karena masyarakat dapat menentukan nasibnya sendiri dengan keterampilan yang diberikan

melalui pemberdayaan sosial. Oleh karena ini, penelitian ini menyarankan alternatif 2 sebagai alternatif Program Kartu Prakerja yang paling efektif, karena didalam programnya memberikan pelatihan kerja bagi para calon tenaga kerja dan pengangguran, yang tentunya sangat berguna untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Dengan demikian, hasil penelitian ini merekomendasikan alternatif agar program ini dijalankan dengan memberikan pelatihan vokasi melalui program skilling, up-skilling dan re-skilling, dan tanpa memberikan insentif bagi para pesertanya. Hal tersebut dikarenakan pemberian pelatihan vokasi dinilai lebih efektif dalam mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kualitas para angkatan kerja di Indonesia. Maka dari itu, berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, program kartu Prakerja layak dijalankan, namun terdapat hal yang perlu dipertimbangkan kembali, yaitu pemberian insentif bagi para pengangguran.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Negara melalui institusi politik bisa menjadi wasit dalam mengatur masalah perekonomian, seperti masalah pengangguran. Hal ini sesuai dengan teori sosiologi ekonomi yang dikemukakan Weber (Achwan, 2014) bahwa institusi politik dan ekonomi memiliki keterkaitan yang erat. Dalam konteks penelitian ini, Negara sebagai institusi politik berperan dalam memaksimalkan peran institusi ekonomi dalam menyerap tenaga kerja, salah satunya lewat program Kartu Prakerja. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam alternatif program kartu prakerja untuk memaksimalkan institusi ekonomi di Indonesia dalam menyerap tenaga kerja dan mengurangi jumlah pengangguran secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achwan, Rochman. (2014). *Sosiologi Ekonomi di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Bhardwaj, Sanjeev. (2018). "Problems Of Unemployment In India And Its Solutions". INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY JOURNAL DELIBERATIVE RESEARCH/Volume-37/Issue-37/Jan.-March, 2018
- Danim, Sudarwan. 2012. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Jakarta : Rineka Cipta
- Dunn, William N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mahmudi, (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP AMP
- Makmur. (2011). *EfektivitasKelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama

-
- Mulyadi, Mohammad. (2016). "Peran Pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan dalam Masyarakat". Kajian Vol. 21 No. 3 September 2016 hal. 221 - 236 (jurnal.dpr.go.id)
- Reynolds, L.G., S.H. Masters and C.H. Moser. 1986. *Labor Economics and Labor Relations*. Ninth Edition. New Jersey : Prentice- Hall, Englewood Cliffs.
- Samuelson, P. A. dan W. D. Nordhaus. 2005. *Ekonomics*. New York: McGraw Hill.
- Shomad, Abdul (2010). "Program Bantuan Langsung Tunai dalam Perspektif Public Choice di Kota Bekasi: Studi Analisis Kebijakan Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Wakil Presiden Jusuf Kalla", Depok: Tesis Universitas Indonesia
- Suharyadi, Asep dan Niken Kusumawardhani, Ridho Al Izzati. (2015). "Efektivitas Program Bantuan Sosial dalam Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan". Bandung: The Smeru Institute
- Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Sukirno. 2004. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Tangkilisan. (2005). *Manajemen Publik*, Jakarta: PT Grasindo
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan